



UUU

LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu kinerja. Kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Kinerja Instansi merupakan kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang melalui system pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga. Kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun ini disusun melalui pengukuran data-data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, Dinas Kelautan dan Perikanan merumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapainya ditetapkan 5 tujuan dan 5 sasaran, sebagai berikut :

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya koordinasi dengan suatu lembaga agar penganggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan

2. Penganggaran belum sesuai dengan kebutuhan kegiatan;

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah merencanakan kegiatan dengan berpatokan kepada hasil dari kinerja yang akan dicapai dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan potensi dan daya dukung lingkungan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq, hidayah, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021. LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang disusun berdasar Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja. Laporan ini memuat rencana pembangunan, tingkat capaian, serta realisas indikator dari sasaran-sasaran

yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

Tahun anggaran 2021 merupakan tahun ketiga dari Renstra OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang . Namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai, tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Kami berharap laporan ini sebagai penyempurnaan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Pangkalpinang, Januari 2021

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Pangkalpinang

JON HERLY, SP, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19641012 198709 1 002

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Gambaran Umum Organisasi	3
1.1.2 Sumber Daya Manusia, Asset OPD Sumberdaya Manusia	6
1.1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued)	18
1.1.4 Sarana dan Prasarana	19
1.2 Maksud dan Tujuan	26
1.3 Sistematika Penulisan	26
BAB II.	29
PERENCANAAN KINERJA	29
2.1 Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan	29
2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan	31
2.3 IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah	33

2.4 Perjanjian Kinerja	33
BAB III	36
AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Pengukuran Kinerja	36
3.2 Capaian Kinerja	41
3.3 Realisasi Anggaran	43
BAB IV	44
PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan Dan Perikanan 2021	6
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	6
Tabel 1. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	19
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2021	37
Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017-2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang	38
Tabel 3. 3 Tabel Indikator Kinerja 2021	41
Tabel 3. 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 (LRA)	43
Tabel 3. 5 Target Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan	44
Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	5
Gambar 1. 2 Diagram Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang berdasarkan Tingkat Pendidikan	6

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|--|
| Lampiran 1. | IKU (Indikator Kinerja Utama) DKP |
| Lampiran 2. | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 |
| Lampiran 3 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun
Anggaran 2021 |
| Lampiran 4 | Laporan Pertanggungjawaban penerimaan
(SPJ Pendapatan) Tahun 2021 |
| Lampiran 5 | Dokumen Pelaksanaan Reviu Renstra dan
IKU |
| Lampiran 6 | Dokumen Monitoring Renstra,Rencana Aksi
dan Perjanjian Kinerja |
| Lampiran 7 | Dokumen Pelaksanaan Evaluasi LAKIP |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diterima (*legitimate*) sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan aparatur negara yang professional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sedangkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap OPD diharuskan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang dan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Pangkalpinang dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Pangkalpinang melalui Sekretariat Daerah Kota.

Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang berisikan mengenai sasaran strategis, kebijaksanaan dan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok&fungsi (tupoksi) masing-masing unit pelaksana di lingkungan . Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja *output* dan atau *outcome* dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 berdasarkan siklus anggaran yang terjadi yaitu 1 tahun, yang secara lengkap menyajikan laporan yang membandingkan antara perencanaan dan hasil.

1.1.1 Gambaran Umum Organisasi

1.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang sebagai perangkat daerah baru terbentuk di tahun 2020. Dasar hukum pembentukan adalah Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Dinas Kelautan dan Perikanan menaungi dua bidang yaitu Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kelautan dan perikanan;
- c. Penyiapan pedoman dan standar penyelenggaraan pembangunan Kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pelatihan dan penyuluhan di bidang Kelautan dan perikanan;
- e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan perikanan;
- f. Pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas;

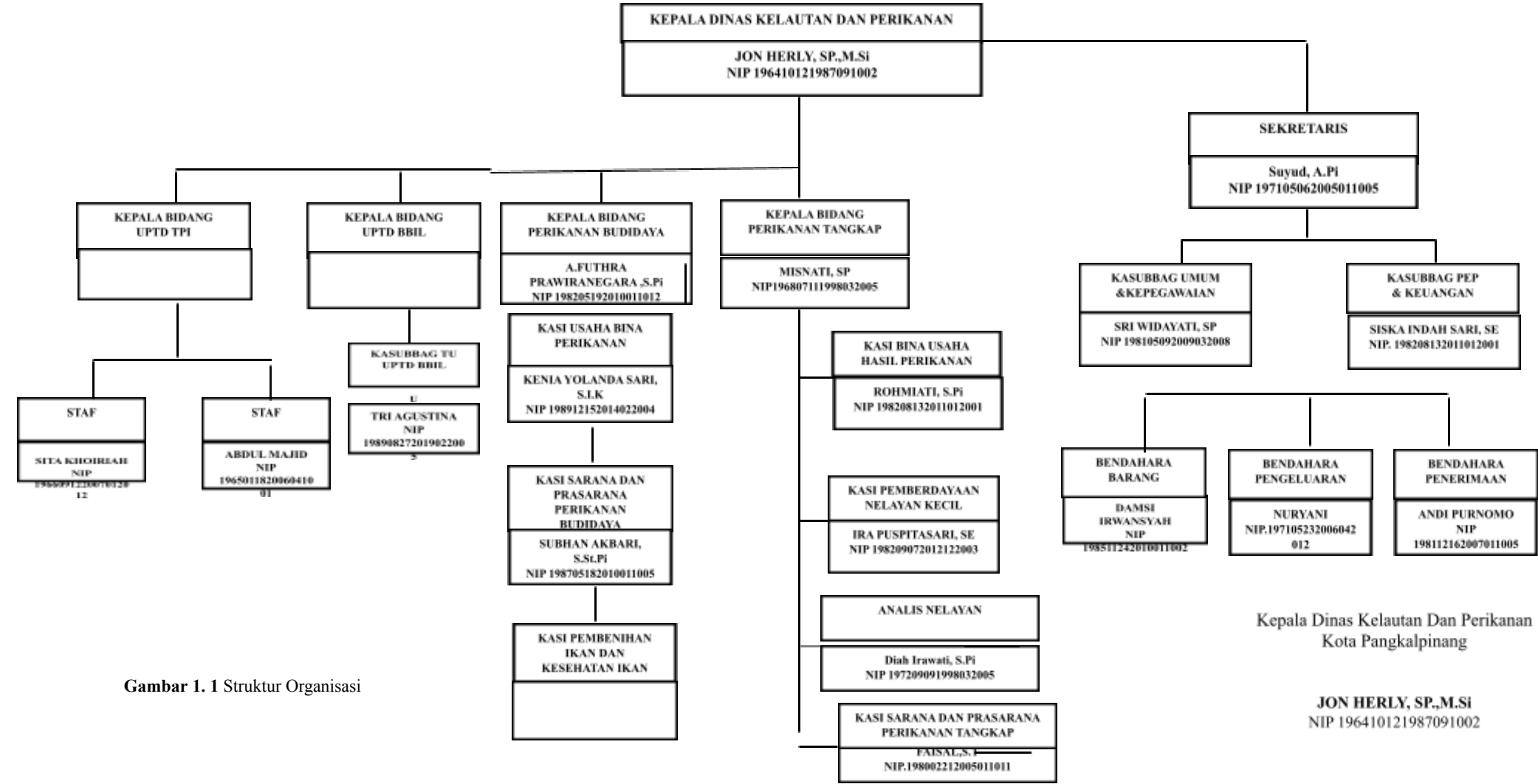
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki Struktur Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perikanan Budidaya;
- d. Bidang Perikanan Tangkap
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPI;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBIL
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang sebagai perangkat pemerintah kota diatur dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor: 24 Tahun 2009, dengan rincian sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021**



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

1.1.2 Sumber Daya Manusia, Asset OPD Sumberdaya Manusia

Dinas Kelautan dan Perikana Kota Pangkalpinang memiliki pegawai dengan jumlah 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari: **Tabel 1.1**

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan Dan Perikanan 2021

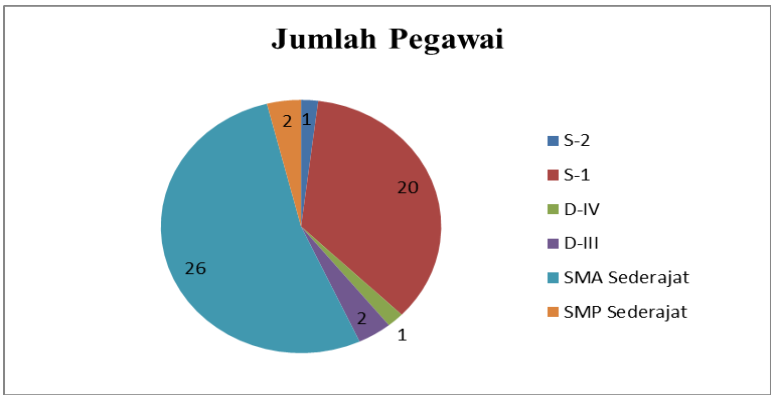
-	Eselon II	:	1	Orang
-	Eselon III	:	3	Orang
-	Eselon IV	:	9	Orang
-	Staf	:	7	Orang
-	Pegawai Kontrak Kegiatan	:	0	Orang

Jika digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang terdiri dari:

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SD	-	-	0
2	SMP/Sederajat	1	1	2
3	SMA/Sederajat	4	22	26
4	DIII	-	2	2
5	DIV	1	-	1
6	S1	13	7	20
7	S2	1	-	1
Total				52

Gambar 1. 2 Diagram Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang berdasarkan Tingkat Pendidikan



A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;

2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Perikanan;
4. Penetapan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perikanan;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Perikanan;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan bidang Perikanan di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

A. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas yang dipimpin seseorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pelayanan Administrasi umum, kepegawaian, penatausahaan keuangan, mengkoordinasikan perencanaan evaluasi dan pelaporan, pengendalian terhadap program, dan pembinaan sumber daya di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi 2 (dua) bagian yang meliputi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai;
4. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi secara berkala; dan

6. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Kelautan dan Perikanan;

Pelaksanaan analisis keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan ;

- Perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Kelautan dan Perikanan.

B. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perikanan tangkap.

Bidang Perikanan Tangkap membawahkan :

- a. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil
- b. Seksi Bina Usaha Perikanan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana

a. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang Perikanan Tangkap. Seksi Pemberdayaan nelayan kecil mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada Seksi pemberdayaan nelayan kecil. Seksi pemberdayaan nelayan kecil mempunyai tugas :

1. Penyusunan rencana seksi pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan rencana kerja
2. Pembantuan Kepala bidang tangkap dalam melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan di bidang perikanan Tangkap
3. Perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil
4. Penyusunan program kegiatan tahunan
5. Pemfasilitasian jaminan keselamatan, jaminan usaha bantuan hukum bagi nelayan kecil

6. Pemberdayaan wanita nelayan serta keluarganya sesuai dengan peraturan perundang undangan dan memfasilitasi peningkatan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan
7. Pemfasilitasian dan pengembangan sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien meliputi kartu nelayan, SKDK (Surat Keterangan Daftar Kapal) dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan.
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang perikanan tangkap langkah dan tindakan apa yang akan diambil dalam bidang tugasnya
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan
10. Penilaian hasil kerja baahan untuk bahan pengembangan karir
11. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugasbawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku
12. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

b. Seksi Bina Usaha Hasil Perikanan Tangkap

Seksi Bina Usaha Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang tangkap dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Bina Usaha Hasil perikanan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan keketentuan peraturan perundang undangan. Seksi Bina Usaha Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana Seksi Bina Usaha Hasil Perikanan sesuai dengan rencana kerja
2. Perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Hasil Perikanan;
3. Penyiapan bahan kebijakan penyebarluasan teknologi bina usaha hasil perikanan
4. Penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan, melalui penyimpanan, transportasi, pendistribusian dan promosi;
6. Pemfasilitasi kemitraan usaha untuk pelaku usaha perikanan/pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
7. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan kepada pengolah dan pemasar hasil perikanan;

8. Pengembangan dan pemfasilitasian terbentuknya kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan
9. Penyediaan fasilitas bagi pengolah dan pemasar ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi
10. Pemfasilitasian dan pengembangan sistem perizinan terpadu efektif dan efisien meliputi surat izin usaha perikanan(SIUP) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, SIUP pengumpul dan penampungan
11. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas kelompok pemasar dan pengolah produk hasil perikanan
12. Penyiapan bahan kebijakan peningkatan konsumsi ikan dan diversifikasi produk olahan hasil perikanan
13. Pelaksanaan dan penyiapan bahan informasi pengembangan investasi dan penumbuhan pelaku usaha produk hasil perikanan
14. Pelaksanaan pengembangan produk non konsumsi hasil perikanan
15. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan bina usaha hasil perikanan
16. Penyusunan program dan kegiatan tahunan
17. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier
18. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Jabatan Kosong)

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sesuai dengan rencana kerja Dinas Perikanan
2. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan program dan kegiatan
3. Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
4. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
5. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

6. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan
7. Pengoordinasian tugas staf yang ada dibawah pengawasan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
8. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang perikanan tangkap tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
10. Penilaian hasil kinerja bawahan untuk bahan pengembangan karir
11. Pemantauan evaluasi dan pelaporan; dan
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

D. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi :

- a. Seksi Produksi Perikanan Budidaya
- b. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan

a. Seksi Produksi Budidaya

Seksi Produksi Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam memimpin, meyenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Produksi Budidaya sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Produksi Budidaya mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana Seksi Produksi Budidaya sesuai dengan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perikanan Budidaya;
3. Perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Produksi Budidaya;
4. Memfasilitasi perjanjian kerjasama anatr pelaku usaha yang mendukung kegiatan produksi dan pemasaran hasil perikanan budidaya

5. Memfasilitasi jaminan keselamatan, jaminan usaha dan bantuan bagi pembudidya;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha bagi pembudidaya ikan;
7. Menyiapkan data dan informasi statistik budidaya
8. Menyiapkan bahan kebijakan investasi usaha perikanan budidaya
9. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan penertiban sistem pendaftaran dan perizinan perikanan budidaya yang efektif dan efisien
10. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan
12. Pengkoordinasian tugas staf yang ada dibawah pengawasan Seksi perikanan budidaya
13. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang perikanan budidaya
14. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir.

b. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan

Seksi Perbenihan dan kesehatan ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan sesuai dengan rencana kerja
2. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan seksi perbenihan dan kesehatan ikan
3. Menyiapkan dan memfasilitasi ketersediaan induk, calon induk dan benih ikan unggul;
4. Menyiapkan bahan kebijakan domestikasi/pemuliaan sumberdaya ikan budidaya di perairan umum, pelestarian dan pemulihan sumberdaya dan lingkungannya;
5. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
6. Menyiapkan pengendalian penggunaan obat ikan kimia dan biologi
7. Menyiapkan bahan kebijakan penyediaan dan penyebaran informasi potensi wabah penyakit ikan

8. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi CPIB (Cara pembenihan ikan yang baik dan CPIB (Cara budidaya ikan yang baik
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan atasan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, pengoordinasian, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana Seksi sarana dan Prasarana sesuai dengan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian program dan kegiatan
3. Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya
4. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana budidaya ikan
5. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan
6. Pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah Seksi sarana dan prasana
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang Perikanan Budidaya tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya
9. Penilaian hasil kerja bawahan untuk pengembangan karir
10. Pemantauan evaluasi dan pelaporan
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

E. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas sebagai Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program;
2. Pelaksanaan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit/benih;
3. Pengelolaan dan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik;
4. Pemberian pelayanan dan pembelajaran pembibitan
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang pembibitan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik beban kerja serta mempunyai wilayah kerja satu/beberapa Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana operasional Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi, bentuk, kedudukan dan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari:

a. UPT. Balai Benih Ikan Lokal

UPT Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di Bidang Pengelolaan Benih Ikan Lokal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BBIL mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan BBIL;
2. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan balai benih ikan lokal yang meliputi pembinaan, petani benih ikan lokal, pemberian penyuluhan dan pengawasan petani benih ikan lokal;
3. Pelaksanaan ketatausahaan UPT; Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Balai Benih Ikan Lokal; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

b. UPT. TPI

UPT TPI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pelayanan Teknis Operasional Tempat Pelelangan Ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT TPI mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan TPI;
2. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan yang meliputi penataan pedagang ikan maupun nelayan yang akan bertransaksi, pengawasan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan, serta menjaga kebersihan pangkalan pendaratan ikan;
3. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang dapat berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa yang akan datang. Isu strategis yang perlu ditangani Dinas kelautan dan perikanan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan produksi perikanan budidaya tahun 2021 sebanyak 664,89 ton (not include PT. SHL) mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 1.300,516 ton. Hal ini disebabkan oleh faktor alam yaitu cuaca yang tidak menentu berdampak pada kondisi penetiran ikan tidak sempurna sehingga tidak menjadi benih. Jumlah benih ikan setiap hasil pemijahan tidak sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. Perubahan cuaca juga berdampak pada perubahan suhu air kolam budidaya secara signifikan sehingga menyebabkan ikan maupun udang mati. Selain faktor alam, juga disebabkan oleh ketersediaan calon induk yang sudah tidak bagus lagi (afkir) sehingga kualitas benih yang dihasilkan menurun. Adanya pandemi covid-19 juga turut berdampak bagi pengusaha budidaya ikan skala kecil yang diikuti dengan penurunan permintaan ikan konsumsi oleh masyarakat khususnya warung-warung pecel lele.
2. Belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan Tangkap dikarenakan mata pencarian nelayan sering berubah ubah (alih profesi) atau mempunyai pekerjaan sampingan, pada saat melakukan pendampingan nelayan sedang melakukan trip ke laut dan sering juga terjadinya pergantian anggota kelompok (KUB/Kelompok Usaha Bersama).

Belum optimalnya pembinaan Kelompok kelompok Pembudidaya Ikan dikarenakan Minat masyarakat tinggi untuk membentuk kelompok hanya diawal2 saat mendengar adanya bantuan kelompok, Ada beberapa kelompok pembudidaya ikan yang tidak aktif lagi dikarenakan konflik intern yang terjadi diantara anggota, Ketidakaktifan kelompok juga disebabkan tidak adanya stimulan bantuan dari pemerintah daerah membuat animo masyarakat perikanan menurun, terbatasnya sarana dan prasarana budidaya, Adanya peralihan pekerjaan dari pembudidaya dikarenakan menurunnya pangsa pasar yang merubah nilai jual ikan khususnya untuk ikan hias cupang.

3. Belum optimalnya produktivitas pengolahan hasil perikanan dan rendahnya produksi pengolahan perikanan karena poklarsar (kelompok pengolah dan pemasar) melakukan produksi pada waktu tertentu

1.1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

NOMOR		SPEKIFIKASI BARANG	Tahun Pembelian	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH BARANG
Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang				
1	2	4	9	11	12	13
1	01.01.01.01.004	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2007	M2	Baik	1
2	01.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	2008	M2	Baik	1
3	01.01.01.02.015	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	1996	M2	Baik	1
4	01.01.02.01.003	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	2015	M2	Baik	1
5	02.01.03.05.010	Pompa Air	2013		Baik	2
6	02.01.03.05.010	Pompa Air	2013		Rusak Berat	1
7	02.01.03.05.010	Pompa Air	2013		Rusak Berat	1
8	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2007		Baik	1
9	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2008		Baik	1
10	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2008		Baik	1
11	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2008		Baik	1
12	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2013		Baik	1
13	02.02.01.03.002	Pick Up	2012		Baik	1
14	02.02.01.03.002	Pick Up	2019		Baik	1
15	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1992		Rusak Berat	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

16	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2006		Baik	1
17	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2008		Baik	1
18	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2008		Baik	1
19	02.03.03.01.072	Global Positioning System	2011		Rusak Berat	1
20	02.03.03.09.018	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2011		Rusak Berat	1
21	02.03.03.09.018	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2011		Rusak Berat	2
22	02.03.03.10.002	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	2015		Baik	1
23	02.04.01.01.013	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	2019		Baik	1
24	02.04.01.01.013	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	2019		Baik	1
25	02.04.01.02.006	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2019		Baik	1
26	02.04.01.06.044	Alat Prosesing lainnya	2009		Baik	1
27	02.04.01.06.044	Alat Prosesing lainnya	2014		Baik	1
28	02.04.01.06.044	Alat Prosesing lainnya	2014		Baik	2
29	02.04.01.06.044	Alat Prosesing lainnya	2014		Baik	20
30	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2005		Rusak Berat	1
31	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2009		Baik	1
32	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	2009		Rusak Berat	1
33	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	2014		Rusak Berat	8
34	02.05.01.04.003	Rak Besi	2006		Rusak Berat	2
35	02.05.01.04.003	Rak Besi	2009		Rusak Berat	1
36	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1998		Rusak Berat	3
37	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2002		Rusak Berat	2
38	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2005		Rusak Berat	3
39	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2009		Rusak Berat	4
40	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2010		Rusak Berat	5
41	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2010		Rusak Berat	1
42	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2012		Rusak Berat	2
43	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2013		Rusak Berat	2
44	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2013		Baik	5
45	02.05.01.04.007	Brandkas	2005		Baik	1
46	02.05.01.04.007	Brandkas	2012		Baik	1
47	02.05.01.04.029	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	2014		Baik	4
48	02.05.01.04.029	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	2014		Baik	1
49	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	2012		Rusak Berat	20
50	02.05.01.05.005	White Board	2004		Rusak Berat	2
51	02.05.01.05.005	White Board	2005		Rusak Berat	2
52	02.05.01.05.005	White Board	2011		Rusak Berat	2
53	02.05.01.05.005	White Board	2012		Rusak Berat	4
54	02.05.01.05.005	White Board	2013		Rusak Berat	1
55	02.05.01.05.005	White Board	2014		Rusak Berat	1
56	02.05.01.05.009	Peta	2014		Rusak Berat	2
57	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	2013		Baik	1
58	02.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	2014		Rusak Berat	1
59	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	2020		Baik	1
60	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	2010		Rusak Berat	1
61	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	2013		Rusak Berat	19
62	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	2013		Rusak Berat	1
63	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	2014		Rusak Berat	1
64	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	1
65	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	1
66	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	1
67	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2013		Baik	8
68	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2020		Baik	2
69	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2020		Baik	11
70	02.05.02.01.008	Meja Rapat	2005		Rusak Berat	11
71	02.05.02.01.008	Meja Rapat	2014		Rusak Berat	3
72	02.05.02.01.008	Meja Rapat	2020		Baik	1
73	02.05.02.01.009	Tempat Tidur Besi	2014		Baik	8
74	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2008		Rusak Berat	2

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

75	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2010		Kurang Baik	2
76	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2010		Rusak Berat	4
77	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2010		Rusak Berat	1
78	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2011		Kurang Baik	6
79	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2012		Kurang Baik	5
80	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2014		Baik	2
81	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2014		Rusak Berat	6
82	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2014		Baik	24
83	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	2014		Baik	16
84	02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	2006		Rusak Berat	18
85	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	2010		Baik	15
86	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	2011		Baik	30
87	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	2020		Baik	42
88	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2009		Baik	1
89	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2010		Baik	1
90	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2014		Baik	1
91	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2020		Baik	1
92	02.05.02.01.032	Kursi Putar	2001		Rusak Berat	1
93	02.05.02.01.032	Kursi Putar	2014		Kurang Baik	6
94	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	2004		Rusak Berat	5
95	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	2005		Kurang Baik	3
96	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	2014		Rusak Berat	60
97	02.05.02.01.039	Meja Komputer	2010		Kurang Baik	1
98	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	2011		Baik	2
99	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	2013		Kurang Baik	2
100	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	2018		Baik	1
101	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	2018		Baik	1
102	02.05.02.04.001	Lemari Es	2014		Rusak Berat	1
103	02.05.02.04.004	A.C. Split	2006		Baik	1
104	02.05.02.04.004	A.C. Split	2013		Baik	1
105	02.05.02.04.004	A.C. Split	2014		Baik	3
106	02.05.02.04.006	Kipas Angin	2014		Baik	1
107	02.05.02.05.002	Kompore Gas (Alat Dapur)	2014		Baik	2
108	02.05.02.05.009	Tabung Gas	2014		Baik	2
109	02.05.02.05.026	Alat Dapur lainnya	2015		Rusak Berat	1
110	02.05.02.06.002	Televisi	2009		Rusak Berat	1
111	02.05.02.06.002	Televisi	2015		Rusak Berat	1
112	02.05.02.06.008	Sound System	2014		Rusak Berat	1
113	02.05.02.06.013	Megaphone	2007		Rusak Berat	2
114	02.05.02.06.014	Microphone	2007		Rusak Berat	2
115	02.05.02.06.018	Unit Power Supply	2014		Rusak Berat	1
116	02.05.02.06.020	Stabilisator	p2014		Baik	4
117	02.05.02.06.032	Tiang Bendera	2014		Baik	1
118	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	2013		Baik	1
119	02.05.02.06.057	Karpet	2014		Rusak Berat	20
120	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020		Baik	1
121	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020		Baik	1
122	02.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable	2007		Baik	6
123	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2020		Baik	2
124	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2005		Rusak Berat	1
125	02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2005		Rusak Berat	1
126	02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2008		Rusak Berat	10
127	02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2009		Baik	2
128	02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2010		Baik	7
129	02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2011		Rusak Berat	4
130	02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2011		Kurang Baik	1
131	02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2012		Kurang Baik	2

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

132	02.05.03.03.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2020		Baik	18
133	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2020		Baik	2
134	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2014		Baik	2
135	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2014		Rusak Berat	3
136	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2010		Baik	3
137	02.06.01.01.005	Audio Amplifier	2007		Rusak Berat	1
138	02.06.01.02.003	Camera Electronic	2012		Baik	1
139	02.06.01.02.003	Camera Electronic	2014		Baik	2
140	02.06.01.02.060	Camera Film	2012		Baik	1
141	02.06.01.02.060	Camera Film	2014		Baik	1
142	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2006		Baik	1
143	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2014		Baik	1
144	02.06.02.01.010	Facsimile	2011		Rusak Berat	1
145	02.06.02.06.002	Wireless Amplifier	2005		Rusak Berat	1
146	02.06.03.47.002	Genset	2013		Baik	1
147	02.08.01.02.001	Autoclave Unit (Alat Lab. Micro Biologi Tehnik Penyehatan)	2013		Baik	1
148	02.08.01.03.014	D.O. Meter	2013		Baik	1
149	02.08.01.11.003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	2013		Baik	1
150	02.08.01.11.003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	2013		Baik	4
151	02.08.01.11.012	Blender	2013		Baik	1
152	02.08.01.11.025	Manometer	2013		Baik	19
153	02.08.01.11.025	Manometer	2013		Baik	20
154	02.08.01.11.025	Manometer	2013		Baik	20
155	02.08.01.11.025	Manometer	2013		Baik	20
156	02.08.01.11.025	Manometer	2013		Baik	20
157	02.08.01.11.025	Manometer	2013		Baik	1
158	02.08.01.11.031	Corong	2013		Baik	5
159	02.08.01.11.043	Crusible Penyaring	2013		Baik	20
160	02.08.01.11.043	Crusible Penyaring	2013		Baik	20
161	02.08.01.11.043	Crusible Penyaring	2013		Baik	20
162	02.08.01.11.050	Lampu Spritus	2013		Baik	10
163	02.08.01.11.100	Laminar Air Flow	2013		Baik	1
164	02.08.01.11.106	Microscope Dengan Camera	2013		Baik	1
165	02.08.01.12.017	Pipette Filter	2013		Baik	5
166	02.08.01.12.059	Petri Dish	2013		Baik	50
167	02.08.01.12.085	alat laboratorium microbiologi lainnya (dst)	2013		Baik	1
168	02.08.01.13.001	Analytical Balance Electric	2013		Baik	1
169	02.08.01.13.034	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	2013		Baik	1
170	02.08.01.14.043	alat laboratorium patologi lainnya (dst)	2013		Baik	1
171	02.08.01.15.040	Rack, Diluter/Pipet	2013		Baik	1
172	02.08.01.47.005	Disecting Apparatus (Alat Laboratorium Biologi Perairan)	2013		Baik	5
173	02.08.01.54.024	laboratorium kearsipan lainnya (dst)	2013		Baik	4
174	02.08.01.54.024	laboratorium kearsipan lainnya (dst)	2013		Baik	5
175	02.08.01.54.024	laboratorium kearsipan lainnya (dst)	2013		Baik	5
176	02.08.01.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Baik	1
177	02.08.01.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Baik	1
178	02.08.01.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Baik	1
179	02.08.01.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	1
180	02.08.01.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	4
181	02.08.01.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	5
182	02.08.01.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	5
183	02.08.01.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	5
184	02.08.01.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	6
185	02.08.01.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	6
186	02.08.01.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	20
187	02.08.01.56.127	alat laboratorium lain lainnya (dst)	2014		Baik	1
188	02.08.02.04.012	Mortar Porcelain	2013		Baik	5
189	02.08.02.04.012	Mortar Porcelain	2013		Baik	5
190	02.08.03.04.012	Gelas Ukur	2013		Baik	10

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

191	02.08.03.04.012	Gelas Ukur	2013		Baik	20
192	02.08.03.04.012	Gelas Ukur	2013		Baik	20
193	02.08.03.04.012	Gelas Ukur	2013		Baik	20
194	02.08.03.04.013	Pipet Tetes	2013		Baik	5
195	02.08.03.05.062	Rak Tabung Reaksi	2013		Baik	2
196	02.08.07.05.043	alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	2013		Baik	1
197	02.08.07.05.043	alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	2013		Baik	1
198	02.10.01.01.002	Mini Komputer	2019		Baik	1
199	02.10.01.01.008	Komputer Jaringan lainnya	2012		Baik	1
200	02.10.01.01.008	Komputer Jaringan lainnya	2013		Baik	1
201	02.10.01.02.001	P.C Unit	2005		Rusak Berat	1
202	02.10.01.02.001	P.C Unit	2005		Baik	1
203	02.10.01.02.001	P.C Unit	2008		Rusak Berat	1
204	02.10.01.02.001	P.C Unit	2009		Rusak Berat	1
205	02.10.01.02.001	P.C Unit	2013		Baik	2
206	02.10.01.02.001	P.C Unit	2013		Rusak Berat	2
207	02.10.01.02.001	P.C Unit	2019		Baik	1
208	02.10.01.02.001	P.C Unit	2020		Baik	2
209	02.10.01.02.001	P.C Unit	2020		Baik	1
210	02.10.01.02.002	Lap Top	2008		Baik	1
211	02.10.01.02.002	Lap Top	2009		Baik	1
212	02.10.01.02.002	Lap Top	2011		Kurang Baik	2
213	02.10.01.02.002	Lap Top	2011		Baik	1
214	02.10.01.02.002	Lap Top	2019		Baik	1
215	02.10.01.02.002	Lap Top	2020		Baik	2
216	02.10.01.02.002	Lap Top	2020		Baik	5
217	02.10.01.02.003	Note Book	2014		Rusak Berat	1
218	02.10.01.02.003	Note Book	2014		Baik	1
219	02.10.02.01.012	Hard Disk	2013		Baik	3
220	02.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2019		Baik	1
221	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010		Rusak Berat	1
222	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011		Baik	2
223	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012		Rusak Berat	1
224	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013		Baik	2
225	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013		Rusak Berat	2
226	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019		Baik	1
227	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020		Baik	5
228	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020		Baik	1
229	03.01.01.01.005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2012	M2	Baik	1
230	03.01.01.02.014	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2009	M2	Baik	2
231	03.01.01.02.014	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2013	M2	Baik	1
232	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2008	M2	Kurang Baik	1
233	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2008	M2	Kurang Baik	1
234	03.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2010	M2	Baik	1
235	03.01.01.29.002	Bangunan Kolam/Bak Ikan	2017	M2	Baik	1
236	03.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2007	M2	Baik	1
237	03.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2008	M2	Baik	1
238	03.01.01.30.002	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	2011	M2	Baik	1
239	03.01.01.32.005	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2013	M2	Baik	1
240	03.01.02.02.004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	2008	M2	Baik	1
241	04.01.01.03.005	Jalan Kabupaten Lain-lain	2007	M2	Baik	1
242	04.01.02.13.001	Jembatan lainnya	2020	M2	Kurang Baik	1
243	04.02.05.02.002	Sumur Artetis	2019	M2	Baik	1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

244	04.02.06.06.001	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2008	M2	Baik	2
245	04.04.02.03.001	Jaringan listrik lainnya	2012	M2	Baik	2
246	04.04.02.03.001	Jaringan listrik lainnya	2014	M2	Baik	1
247	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
248	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
249	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
250	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
251	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
252	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
253	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
254	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
255	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
256	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
257	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
258	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
259	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
260	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
261	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
262	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
263	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
264	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
265	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
266	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
267	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
268	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	4
269	05.01.01.01.003	Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	4
270	05.01.01.01.012	Buku Umum Lain-lain	2013		Rusak Berat	14
271	05.04.01.01.003	Ikan Air Payau Budidaya	2007		Baik	909
272	05.04.01.01.003	Ikan Air Payau Budidaya	2019		Baik	40
273		Tanah Kementrian Kelautan dan Perikanan		M2		
274		Alat Besar	2021		Baik	1
275		Alat Besar	2021		Baik	1
276		Alat Besar	2021		Baik	1
277		Alat Besar	2021		Baik	1
278		THERMOMETER INFRARED GUN	2020		Baik	1
279		Pokdakan Air Nangka	2021		Baik	1
280		Pokdakan Bedincak	2021		Baik	1
281		Pokdakan Pani Farm	2021		Baik	1
282		Pokdakan Budidaya Mina	2021		Baik	1
283		Pokdakan Sumber Rejeki	2021		Baik	1
284		Sarana Pendukung Keg. Penangkapan Ikan	2021		Baik	1
285		Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	2021		Baik	1

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang selama Tahun Anggaran 2021;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang pada Tahun 2021, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan LKJIP di jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang sehingga terciptanya Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dengan demikian LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang ini pada prinsipnya mempunyai fungsi utama sebagai alat komunikasi tertulis kepada *stakeholder* yang menggambarkan seberapa jauh kinerja yang telah ditargetkan dapat dicapai untuk terwujudnya Visi dan Misi sekaligus sebagai alat evaluasi bagi perbaikan kinerja yang akan datang.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi (tupoksi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia), dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang

sedang dihadapi organisasi.

BAB.II PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar tentang:

- A. Rencana Strategis Perangkat Daerah
Pada bagian ini dijelaskan keterkaitan antara kinerja Perangkat Daerah terhadap pencapaian misi Kota Pangkalpinang
- B. IKU Perangkat Daerah (lampiran 1)
- C. Perjanjian Kinerja (lampiran 2)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat

Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan melalui perbaikan-perbaikan sistematis dan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Pangkalpinang yang diselaraskan dengan arah pembangunan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maupun Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang 2018-2023 digunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian visi dan misi Walikota serta tujuan organisasi. Visi Pemerintahan kota Pangkalpinang berdasarkan RPJMD Kota Pangkalpinang

**“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**

Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 5 (lima) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas serta memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan kota Pangkalpinang mengacu dan mendukung **misi 1 (Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan)**

Mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kota Pangkalpinang yang telah ditetapkan serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan Tujuan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang mengacu Pada **Tujuan 2 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan.

Adapun Tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu :

1. Meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Dengan Indikator Tujuan :

1. Pendapatan Nelayan Perikanan Tangkap
2. Pendapatan Pembudidaya Ikan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. Sasaran juga memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, teruji, dapat diukur dan dapat dicapai serta saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya.

Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan periode tahun 2018 – 2023 adalah **Menurunnya tingkat Kemiskinan** dengan arah kebijakan :yaitu

1. Meningkatkan produksi perikanan (Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap)
2. Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI)

dengan Indikator Sasaran :

1. Produksi Perikanan (Ton)
2. Angka Konsumsi Ikan (AKI)

2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan

Strategi-strategi sesuai misi yang telah ditetapkan, berikut strategi pencapaian sasarannya adalah:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana perikanan Tangkap dan Budidaya,.
2. Memberikan Pelatihan Bimbingan Teknis kepada Nelayan/pembudidaya Ikan
3. Memberikan Pembinaan kepada POKLAHSAR (kelompok pengolah dan pemasar) sehingga dapat meningkatkan produksi pengolahan perikanan

b. Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

Arah Kebijakannya adalah :

1. Mempercepat peningkatan sarana dan prasarana Tangkap dan Pembudiya,
2. Memperbanyak pelatihan bimbingan teknis kepada Nelayan danPembudidaya Ikan
3. Memberikan Pembinaan kepada POKLAHSAR (kelompok pengolah dan pemasar) sehingga dapat meningkatkan produksi pengolahan perikanan

Pada tahun 2021 Rencana Startegis yang dil Laksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Pembangunan Sarana dan Prasaran Perikanan Tangkap dalam hal Ini atas aspirasi masyarakat dimana tambat labuh nelayan yang sebelumnya sudah ada namun sudah tidak layak dan bisa mengakibatkan resiko kecelakaan bagi pengguna (masyarakat) maka pada Tahun 2021 dilakukan Direhabilitasi/Renovasi Tambat Labuh Nelayan yang berlokasi di rt.07 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

Kepelabuhanan perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal perikanan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah. Salah satu bentuk yang sudah dilakukan

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Rehabilitasi Tambat Labuh Nelayan yang tertuang dalam Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah sungai,waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dan pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap. Tujuan dari pembangunan ini adalah:

1. Untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan perikanan yaitu untuk kapal bertambat/bersandar dan untuk melakukan membongkar hasil tangkapan.
2. Untuk kepentingan operasional nelayan dan merupakan salah satu pelayanan yang diberikan Pemerintah.

Kebijakan strategis pada Tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pembangunan/Rehabilitasi Tambat Labuh nelayan	Peraturan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang No.05 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023)	Untuk mendukung misi Dinas Kelautan dan Perikanan yakni Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dengan arah kebijakan Peningkatan Kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan,baik itu perikanan budidaya dan perikanan tangkap, maka pada Tahun 2021 dilakukan Renovasi/Rehabilitasi Tambat Labuh Nelayan.

Gambar 2.1 Tambat Labu Nelayan



2.3 IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021 adalah sebagai berikut: **(Lampiran 2)**

1. Produksi Perikanan /Ton (Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap)
2. Angka Konsumsi Ikan (AKI)

2.4 Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang telah disusun Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator-indikator kinerja yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dalam renstra SKPD. Untuk mencapai keberhasilan indikator kinerja di Tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang didukung oleh 4 Program dan 10 Kegiatan dan 25 sub kegiatan yang terdiri dari :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ☐ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ☐ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ☐ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ☐ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ☐ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ☐ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ☐ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ☐ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ☐ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ☐ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ☐ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ☐ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- ☐ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ☐ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ☐ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ☐ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ☐ Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PERIKANAN TANGKAP

Pengolahan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ☐ Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- ☐ Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- ☐ Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

Pengolahan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- ☐ Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- ☐ Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ☐ Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ☐ Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ☐ Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2023 telah ditetapkan bahwa sasaran yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah :

1. Meningkatkan produksi perikanan (Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap)
2. Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Sasaran tersebut di atas terkait erat dengan visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang Selanjutnya dari sasaran di atas, telah dijabarkan kedalam rencana kinerja tahunan. Sebagai konsekuensinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang telah menjabarkan dalam rencana anggaran tahun 2021. Untuk mengetahui capaian sasaran strategis dari berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

3.1 Pengukuran Kinerja

Sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data - data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) Data internal, berasal dari system informasi yang diterapkan di OPD, dan (2) Data eksternal, berasal dari luar Instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien. Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Berdasarkan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, diperoleh hasil kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan kota Pangkalpinang dengan rincian seperti pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula/Rumus	Satuan	Target		Realisasi	
					2020	2021	2020	2021
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Meningkatkan Produksi Perikanan Dalam Ton	Produksi perikanan (ton)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2000	2.250	1.300,52	664,89 (Nilai SebelumValidasi)
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.212	1.126,51	1.009,34	1.168,00 (Nilai Sebelum Validasi)
	Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kapita/Tahun	52,2	53,24	69,38	69,73 (nilai sebelum validasi)

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017-2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Kinerja	Rumus	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Nelayan		Orang	609	645	725	813
2	Produksi garam		Juta Ton	-	-	-	-
3	Luas Kawasan konservasi perairan		Juta HA	-	-	-	-
4	Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Ikan (Ton) x 100 %	Juta Ton	2,941	3,088	930,08	1.099,30
5	Produksi Perikanan Budidaya	Target Daerah (Ton)	Juta Ton	3091	3137	2457.88	1300.51
6	Jumlah luasan usaha budidaya yang diindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya		Ha	944	5795	2457	865
7	Jumlah hari operasional speedboat		Hari	-	-	-	-
8	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP		Kelompok	-	-	-	-
9	Konsumsi ikan		Kg/KAP/TH	38.94	41.16	56.57	69.38
10	Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan		Sertifikat	-	-	-	-

11	Luas kawasan konservasi perairan yang operasional			Juta HA	-	-	-	-
12	Rata-rata pendapatan nelayan			Rp Juta/Orang/Bulan	-	-	-	-
13	Pendapatan pembudidaya ikan			Rp Juta/Orang/Bulan	3500000	3100000	2900000	2200000
14	Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya			Unit	-	-	-	-
15	Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah yang diperiksa kepatuhannya			Pelaku Usaha	-	-	-	-
16	Angka Konsumsi Ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	X100%	Kg/Kapita/Tahun	38.94	41,16	56,57	69,38
		Target Daerah (Kg)						
17	Cakupan bina kelompok nelayan	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan batuan pemda tahun	X100%	%	-	-	2,5%	-
		Jumlah Kelompok Nelayan						
18	Produksi Perikanan kelompok nelayan	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	X100%	%	-	-	-	-
		Jumlah Produksi Ikan di Daerah						
19	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Jumlah Tangkapan Ikan	X100%	%	-	-	-	-
		80% dari tangkapan maksimum lestari						

20	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Kawasan Lindung Perairan			-	-	-	-
		Total Luas Perairan Teritorial						
21	Nilai tukar nelayan	Indek yang diterima Nelayan	X100%	%	-	-	-	-
		Indek yang dibayar Nelayan						

3.2 Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota Pangkalpinang terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Kelautan Perikanan Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi atau kinerja nyata dengan yang direncanakan (target sasaran) sebelum dievaluasi/divalidasi dari Pusat (Kementrian Kelautan dan Perikanan)

Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, untuk mengukur sasaran ini digunakan 3 indikator kinerja utama:

Tabel 3. 3 Tabel Indikator Kinerja 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%
1	Jumlah Produksi Perikanan (Total)	3.376,51	1.832,89 Ton	54,28%
	Jumlah produksi perikanan budidaya	2.250 ton	664, 89 ton (Nilai belum validasi)	29.55 %
2.	Jumlah produksi perikanan Tangkap	1.126,51 ton	1.168,00 (Nilai belum validasi)	103,68 %
	Angka konsumsi ikan masyarakat	53,24 kg/kapita/tahun	69.73 (Nilai belum validasi)	131.07 %

Jumlah produksi perikanan budidaya yang menjadi target tahun 2021 adalah 2.250 ton dan teralisasi sebesar 664,89 ton atau 29,55 %. Jumlah produksi perikanan tangkap yang menjadi target tahun 2021 adalah 1.126,51 ton dan teralisasi sebesar 1.168,00 ton atau 103,68 %. Untuk jumlah nilai realisasi produksi perikanan tangkap dan budidaya adalah nilai data yang belum di validasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan .Angka konsumsi ikan yang menjadi target 2021 adalah 53,24

kg/kapita/tahun dan teralisasi sebesar 69.73 kg/kapita/tahun. nilai realisasi melebihi target. Data angka konsumsi ikan diatas masih nilai estimasi dan belum divalidasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Semua data diatas merupakan data Estimasi/belum divalidasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang belum divalidasi, dikarenakan Data yang sudah di validasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang biasanya diterima di bulan Maret atau paling lama disekitar bulan Mei.

Usaha pencapaian indikator kinerja pada sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan konsumsi ikan masyarakat didukung oleh 3 (tiga) program; 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dari pengukuran Kinerja diatas jelas terlihat Realisasi Produksi Perikanan Budidaya jauh dari target yang ingin dicapai pada Tahun 2021 dimana terdapat kendala/hambatan sebagai berikut : Dimana Target Kinerja pada Tahun 2021 tersebut adalah 2.250 Ton dan Realisasi Kinerja sebesar 664,89 Ton mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 1.300,516 ton. Hal ini disebabkan oleh faktor alam yaitu cuaca yang tidak menentu berdampak pada kondisi peneluran ikan tidak sempurna sehingga tidak menjadi benih. Jumlah benih ikan setiap hasil pemijahan tidak sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. Perubahan cuaca juga berdampak pada perubahan suhu air dikolam budidaya secara signifikan sehingga menyebabkan ikan maupun udang mati. Selain faktor alam, juga disebabkan oleh ketersediaan calon induk

yang sudah tidak bagus lagi (afkir) sehingga kualitas benih yang dihasilkan menurun dan sudah tidak produktif lagi sehingga perlu diganti indukan yang baru atau pengadaan Indukan baru yang berkualitas dan juga diberikan bantuan oleh Pemerintah kepada Pembudidaya Ikan.

3.3 Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang diuraikan sebagai berikut; Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.4.363.962.000 (*empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar

Rp.3.282.426.500 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta emapt ratus dua puluh enam ribu lima ratus upiah*) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.081.535.500 (*Satu milyar delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

Tabel 3. 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 (LRA)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATANDAERAH	252.000.000,00	183.921.318,03	72,98	15.081.341,00
4 . 1	PENDAPATANASLI DAERAH (PAD)	252.000.000,00	183.921.318,03	72,98	15.081.341,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	252.000.000,00	183.921.318,03	72,98	15.081.341,00
5	BELANJA DAERAH	4.363.962.000,00	4.282.259.151,00	98,13	3.180.659.609,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	3.282.426.500,00	3.211.617.446,00	97,84	2.199.454.460,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.967.664.551,00	1.955.543.688,00	99,38	893.965.945,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan	1.314.761.949,00	1.256.073.758,00	95,54	1.305.488.515,00
5 . 2	BELANJA MODAL	1.081.535.500,00	1.070.641.705,00	98,99	981.205.149,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal	515.350.000,00	510.555.705,00	99,07	435.306.649,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset	566.185.500,00	560.086.000,00	98,92	545.898.500,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.111.962.000,00)	(4.098.337.832,97)	99,67	(3.165.578.268,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN(SILPA)	(4.111.962.000,00)	(4.098.337.832,97)	99,67	(3.165.578.268,00)

3.3.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang untuk pendapatan per Desember 2021 mencapai 72,98% atau sebesar Rp. 183.921.318,03 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 252.000.000, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3. 5 Target Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI / PELAMPAUAN ANGGARAN
			PENERIMAAN			
			PENYETORAN			
			SISA			
4 . 1 . 2 . 14 . 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	252.000.000,00	177.118.318,03	0,00	177.118.318,03	74.881.681,97
			177.118.318,03	0,00	177.118.318,03	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 24 . 03	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0,00	4.828.000,00	0,00	4.828.000,00	(4.828.000,00)
			4.828.000,00	0,00	4.828.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 28 . 02	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	(1.975.000,00)
			1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
JUMLAH		252.000.000,00	183.921.318,03	0,00	183.921.318,03	68.078.681,97
			183.921.318,03	0,00	183.921.318,03	
			0,00	0,00	0,00	

3.3.2 Belanja

Realisasi capaian target kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang untuk belanja daerah mencapai 98,13 % atau sebesar Rp. 4.282.259.151,00

(Empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus lima puluh satu rupiah) dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.4.363.962.000 (Empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Untuk merealisasikan dan mencapai target-target sasaran melalui pencapaian target indikator kinerja utama dan realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dapat dilihat penjelasannya dengan gambaran pada Tabel dibawah ini dan dengan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan terlampir :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No	Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					4,359,338,000	4,282,259,151				
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4,359,338,000	4,282,259,151				
1	Kelauatan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2,610,095,176	2,564,212,383				
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100%	100%	5,647,900	5,647,900				
				1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	%	100	100	5,647,900	5,647,900				

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

				a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	2,555,000	2,555,000.00			
				b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1,774,250	1,774,250.00			
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
				c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPIP, RB dan LAKIP yang disusun	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1,318,650	1,318,650.00			
				1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	%	100	100	1,935,117,401	1,924,966,538			
				a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Orang	19 orang	19 orang	1,932,514,551	1,922,363,688.00			
				b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	5 laporan	5 laporan	1,154,250	1,154,250.00			
				c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	5 laporan	5 laporan	1,448,600	1,448,600.00			
						Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ku alifikasi pada unit kerjanya		100%	100%	22,500,000	22,450,000			
				1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	%	100	100	22,500,000	22,450,000			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

				a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Orang	9 orang	5 orang	22,500,000	22,450,000.00			
						Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100%	100%	59,563,500	57,423,100			
				1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi umum	%	100	100	59,563,500	57,423,100			
				a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	7 jenis	7 jenis	3,598,000	3,598,000			
				b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	12,363,500	12,213,500			
				c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	7 jenis	7 jenis	9,722,000	8,422,000			
				d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kali	16 kali	16 kali	33,880,000	33,189,600			
				1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	%	100	100	447,723,750	431,547,551			
				a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani	Jenis	2 jenis	2 jenis	36,000,000	34,744,301			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

				b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	unit/set	13 unit/set	13 unit/set	9,940,500	7,727,000			
				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Orang	22 Orang	22 Orang	401,783,250	389,076,250			
				1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	139,542,625	122,177,294			
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang dipelihara	Unit	1 unit	1 unit	28,855,825	21,760,000			
				b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	4 unit	4 unit	88,088,000	78,417,294			
				c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor /bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1 unit	1 unit	22,598,800	22,000,000			
				2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Ton	1,126.51	1,168.00	794,993,974	785,083,880			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

				2.1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan data dan sarana prasaran usaha perikanan tangkap	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	739,580,774	731,626,180			
				a.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen yang tervalidasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	84,486,400	82,990,000			
				b.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang diadakan	Unit	2 Unit	2 Unit	633,594,374	627,204,180			
				c.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	21,500,000	21,432,000			
				2.2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Unit	1 unit	1 unit	55,413,200	53,457,700			
				a.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah UPT TPI yang beroperasi	Unit	1 unit	1 unit	55,413,200	53,457,700			
				3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Ton	2,250	664,89	954,248,850	928,338,888	1. Penurunan produksi perikanan budidaya tahun	1.Indukan ikan yang dibutuhkan harus diperbaharui dengan diadakannya	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

												2021 sebanyak 664,89 ton (not include PT. SHL) mengala mi penuruna n yang cukup signifikan dibandin gkan dengan tahun sebelumn ya 1.300,51 6 ton. Hal ini disebabk an oleh faktor alam yaitu cuaca yang tidak menentu berdamp ak pada kondisi penelura n ikan tidak sempurn a sehingga tidak menjadi benih. Jumlah benih ikan setiap hasil pemijaha n tidak	indukan ikan yang baru 2. diberikan nya bantuan sarana dan prasarana untuk pembudid aya ikan	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

												sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. Perubahan cuaca juga berdampak pada perubahan suhu air dikolam budidaya secara signifikan sehingga menyebabkan ikan maupun udang mati.Selain faktor alam, juga disebabkan oleh ketersediaan calon induk yang sudah tidak bagus lagi (afkir) sehingga kualitas benih yang dihasilkan menurun.		
				3.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2,250	664,89	954,248,850	928,338,888			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

				a.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tervalidasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	124,742,000	121,798,000			
				b.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bibit ikan yang tersedia	Benih	100.000 benih	0	357,619,850	342,099,886	Induk ikan yang sudah afkir/tidak produktif lagi	Indukan ikan yang dibutuhkan harus diperbaharui dengan diadakannya indukan ikan yang baru	
				c.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	471,887,000	464,441,002			
				4.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya AKI (Angka Konsumsi Ikan) dan usaha pengolahan hasil perikanan	Kg/Kapita/Tahun	53,24	69.73	0	4,624,000			
				4.1	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	kecamatan	7	7	m	4,624,000			
				a.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	53,24 Kapita/Tahun	69,73Kapita/Tahun	4,624,000	4,624,000			
										4,359,338,000	4,282,259,151			

NB : untuk nilai Produksi Perikanan Budidaya dan
 Tangkap dan angka konsumsi ikan TA.2021 masih
 nilai estimasi(belum di valisasi)

Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2021 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban yang untuk kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsive terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan kinerja instansi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang di tahun-tahun berikutnya

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan bidang perikanan yang selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Sebagai pelaksana atau instansi teknis telah melaksanakan tugas/kegiatan sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.

4.2 Saran

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas kedepan untuk dapat mencapai sasaran tujuan, misi dan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, diharapkan kepada semua unit organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang penting serta secara aktif mendiskusikani isu-isu aktual yang berkembang saat ini dan permasalahan yang masih perlu dicarikan solusinya sehingga dapat terumuskan dengan baik di dalam Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota

Pangkalpinang Tahun 2022.

Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PANGKALPINANG

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula / Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja 2021	Realisasi kinerja 2021
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan			0,31	
	Meningkatkan Produksi Perikanan Dalam Ton	Produksi perikanan (ton)	Ton	Ton	3.376,51	2.309,852

	Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Kapita/ Tahun	Kg/Kapita /Tahun	53.24	69,38
--	--	---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------

Pangkalpinang, Januari 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTAPANGKALPINANG

JON HERLY, SP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 19641012 198709 1 002